

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

- 5.1.1.** Konsep politik hukum mengatakan bahwa hukum dibuat oleh politik, dan politik menetapkan kebijakan hukum dan mengkritik undang-undang. Tanggung jawab sosial perusahaan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Negara dan mendorong sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Di Indonesia, ada banyak masalah yang menghalangi penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). Selain itu, ada perbedaan dalam definisi CSR antara Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang menyebabkan kesulitan dalam menafsirkan prosedur pelaksanaannya. Akibatnya, terlihat bahwa pembuat kebijakan dan DPR berusaha untuk membuat peraturan yang responsif sambil mempertahankan demokrasi daripada kewenangan.
- 5.1.2.** Konsep kepastian hukum dapat dianalisis dengan mempertimbangkan berbagai konsep peraturan yang berkaitan dengan masalah tanggung jawab sosial. Namun, peraturan tersebut seringkali berbeda, dan banyak konsep tersebut saling terkait. Misalnya, UU No. 25 Tahun 2007 menganggap tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab moral perusahaan. Perspektif hukum tentang tanggung jawab sosial berfokus pada hal-hal berikut: mengakui kekuatan hukum yang baik, mengakui pentingnya hukum, mengakui fakta-fakta yang mendukungnya, dan memahami tugas pemerintah untuk mendorong tanggung jawab sosial.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) merupakan kewajiban yang membantu perusahaan mengikuti prinsip-prinsip tanggung jawab sosial, seperti melindungi lingkungan, mencegah polusi, dan memastikan tindakan mereka sejalan dengan tujuan tanggung jawab sosial mereka.

5.2 Saran

- 5.2.1.** Pemerintah mesti membuat undang-undang yang jelas dan menyeluruh mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Undang-undang ini harus memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar dan bahwa perusahaan yang tidak melakukannya akan bertindak lebih ketat. Pengawasan ini harus dilakukan oleh badan pengawas yang independen dengan sumber daya yang cukup untuk melakukan inspeksi dan pengawasan yang efektif.
- 5.2.2.** Bagi perusahaan. Pentingnya mematuhi hukum sangat penting untuk operasional bisnis. Perusahaan harus memahami dan mematuhi hukum yang berlaku, dan mereka juga harus membuat sistem pengawasan yang kuat untuk memastikan bahwa mereka melakukan apa yang mereka rencanakan untuk dilakukan. Oleh karena itu, perusahaan memiliki kemampuan untuk meningkatkan kepercayaan, kinerja, dan komitmen mereka terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan.